

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika*. Jakarta. 2009.
- Ahmad, Erani Yustika. *Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional*. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Jakarta.2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006
- Ateng Syafrudin, Suprin Na'a, *Republik Desa, Alumni*, Bandung, 2010.
- Azhari, Negara *Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, UIPress, Jakarta, 1995.
- Fakrullah, Zudan dkk, *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*. Jakarta: CV. Cipruy. 2004.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Jakarta: Setara Press, 2015.
- \_\_\_\_\_,. *Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Juliantra, Dadang. *Pembaharuan Desa Bertumpu Pada Angka Terbawah* .Yogyakarta:: Lapperapustakautama.2003.
- Kaloh. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Karen, Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*. Indianapolis: Augsburg Publishing House.1986.

Karim, Abdul Gaffar. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Manshuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: PolGov, 2013.

Sitompul, Rislina F, *Merancang Model Pengembangan Masyarakat Pedesaan dengan Pendekatan System Dynamics*. Jakarta: LIPI Press, 2009.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991

Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2010

Sungguno, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1984.

Soetandyo, Wignosubroto dkk (Tim Penulis), *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Jakarta: Institute for Local Development dan Yayasan Tifa, 2005.

The Liang Gie, *Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Supersukses, 1982.

Wahjono Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yudoyono, Bambang. *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 2003.

Jurnal Suryaningsih, *Sejarah Perkembangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Indonesia: Dahulu, Kini dan Masa Depan*, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Sospol Universitas Abdurarrab Pekanbaru.

Sumbar Dalam Angka Tahun 2016

Sumbar Dalam Angka Tahun 2017

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun  
Tahun Anggaran 2018

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber  
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata  
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana  
Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:199/PMK.07/2017 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:225/PMK.07/2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:225/PMK.07/2017 tentang Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

### **Media Massa**

Harian Umum Haluan. Rabu, 31 Agustus 2016

Prioritas di Perbatasan”, Kompas, Senin, 17 November 2014.

### **Media Elektronik**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah\\_pada\\_5\\_Juni\\_2018](https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_pada_5_Juni_2018)

Ivan Mubarok, SH. Implementasi Otonomi Desa Menurut UU 32/2004.  
<http://politikana.com/baca/2011/01/27/implementasi-otonomi-desa-menurut-uu-no-32-2004>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)online